

PEMBERDAYAAN NELAYAN PANTAI PANANJUNG OLEH DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Didit Setiawan¹, Kiki Endah², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: diditpnd@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pemberdayaan nelayan pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran masih kurang optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pengembangan kemampuan dan keahlian nelayan melalui pengembangan kapasitas nelayan, kurangnya fasilitasi yang diberikan dinas pada nelayan untuk memperoleh modal usaha, mengembangkan jaringan dan kemitraan serta penyediaan sarana prasarana pendukung, pihak Dinas kurang mendorong nelayan dalam proses pembangunan di bidang ekonomi secara optimal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan nelayan pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu analisis data dan informasi, interpretasi dan elaborasi, kategorisasi dan unitisasi data, triangulasi, member check, diskusi dan memberikan tafsiran. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan namun kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu belum adanya agenda, belum memadainya sarana dan fasilitas pendukung, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan sumber anggaran, belum adanya kesepakatan kerjasama, belum adanya pihak swasta yang bersedia memberikan bantuan modal usaha, kurang dimilikinya sikap kebersamaan diantara anggota kelompok. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu menyusun ulang agenda kegiatan, menyediakan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan kapasitas kelompok, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota melalui pemberian arahan dan penjelasan secara rutin, mengajak anggota kelompok untuk menjalin hubungan dan komunikasi dan mengajak untuk lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, mengajukan permohonan penambahan anggaran pada pemerintah daerah, menjalin kerjasama dengan pihak perbankan untuk mempermudah nelayan dalam pengajuan pinjaman dan pihak swasta untuk bersedia memberikan bantuan modal usaha, mengajak anggota untuk saling kerja sama dan meminta untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Nelayan, Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan*

PENDAHULUAN

Topik pemberdayaan nelayan penting dikaji untuk mengatasi problem besar nelayan, kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan dan keterasingan. Seperti yang disebutkan, hal tersebut merupakan ironi karena terjadi justru di tengah masyarakat yang bekerja mencari sumberdaya yang melimpah. Untuk itu, memang tidak ada jalan lain kecuali mengeluarkan nelayan dari perangkap keterbelakangan seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan yang efektif. Namun, formulasi konsep pemberdayaan tersebut sulit dilakukan tanpa pemahaman tentang pergeseran paradigma pembangunan yang melatarbelakangi munculnya gagasan pemberdayaan serta pemahaman tentang karakteristik sosial nelayan suatu kelompok manusia yang akan diberdayakan. Dengan demikian program pemberdayaan untuk nelayan haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya.

Kondisi nelayan di Kabupaten Pangandaran merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan

diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Kondisi seperti ini dirasakan oleh masyarakat nelayan di Desa Pananjung. Kondisi seperti itu tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Pantai Pananjung, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat nelayan. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Akan tetapi tidak semua program tersebut tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk nelayan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu di Kabupaten Pangandaran diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan

Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan Pasal 1 Ayat 7 dan 8, menyebutkan bahwa:

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha perikanan secara lebih baik.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Namun kenyataannya di Desa Pananjung dari 716 nelayan 427 diantaranya masih kurang mampu memahami diri dan potensinya, tidak mampu mengarahkan dirinya sendiri, tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya, serta kemampuan kewirausahaannya masih rendah. (Sumber: Profil Desa Pananjung. 2020)

Masyarakat di Desa Pananjung diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan sehingga kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya.

Sebagai akibatnya adalah program pemberdayaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Bahkan bantuan yang diberikan justru menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat dari pada menolongnya sehingga mereka tidak dapat mensejahterakan kehidupannya. Pelaksanaan pemberdayaan nelayan di Desa Pananjung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya masih kurang optimal hal ini disebabkan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada nelayan dalam kegiatan usahanya belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dan kurangnya dalam memahami dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan mengenai pemberdayaan nelayan pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengembangan kemampuan dan keahlian nelayan oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan melalui pengembangan kapasitas nelayan seperti kurang adanya pembinaan dan penyuluhan pada individu maupun kelompok nelayan
2. Kurangnya fasilitasi yang diberikan dinas pada nelayan untuk

memperoleh modal usaha, mengembangkan jaringan dan kemitraan serta penyediaan sarana prasarana pendukung sehingga menyebabkan nelayan relatif tertinggal secara ekonomi, sosial, dan kultural seperti belum dapat memberikan bantuan alat tangkap berupa, gill net, trammel net, pancing rawai, bagan, pukot pantai dan jarring dogol pada nelayan sehingga masih banyak nelayan menangkap ikan hanya dengan menggunakan satu jenis alat tangkap saja sehingga hasil tangkapnya sedikit dan jenis ikan yang ditangkapnya kurang beragam.

3. Pihak Dinas kurang mendorong nelayan dalam proses pembangunan di bidang ekonomi secara optimal seperti kurangnya pemberian arahan dan bimbingan pada nelayan terkait teknik dan cara mengelola usaha tangkap ikan

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran?”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai

masyarakat. Konsep ini mencerminkan paradigma baru yang menekankan pada peran serta masyarakat kesinambungan serta fokus pembangunan pada manusia. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif.

Soetomo (2011: 22) menyatakan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya.

Mardikanto dan Subiato, (2019 :113) menyatakan bahwa : Lingkup dan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :

1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia

2. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina usaha yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan, tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan.

3. Bina Lingkungan

Pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi. Termasuk dalam tanggung jawab sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (areal kerja) dan segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Bina Kelembagaan

Tersedianya dan efektifitas kelembagaan akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Kelembagaan sebagai perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas masyarakat.

Pengertian Nelayan

Pengertian nelayan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 10 bahwa: “Nelayan merupakan mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Nelayan merupakan mata pencaharian warga pesisir yang tinggal didekat laut maupun tepi pantai. Nelayan yang kita ketahui bekerja cuman menangkap ikan saja, tetapi nelayan bekerja di laut dan terkadang mereka mengolah usaha tambak. Seperti tambak udang, menjadi petambak garam dan pembudidaya ikan.

Selanjutnya menurut Subri, (2005:7) adalah sebagai berikut: “Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya”.

Dengan demikian nelayan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya

METODE

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, hal ini karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini juga dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu analisis data dan informasi, interpretasi dan elaborasi, kategorisasi dan unitisasi data, triangulasi, member check, diskusi dan memberikan tafsiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bina Manusia

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi bina manusia bahwa kegiatan mengembangkan kapasitas individu untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian nelayan, pihak dinas pada dasarnya telah dapat melaksanakannya, walaupun tidak semua nelayan dapat mengikutinya. Kegiatan-kegiatan pengembangan tersebut dapat berupa pemberian penerangan dan penyuluhan.

Kemudian pengembangan terhadap kapasitas kelompok nelayan bahwa pengembangan kapasitas bagi kelompok nelayan masih belum optimal dilaksanakan oleh pihak dinas, kegiatan tersebut jarang dilaksanakan dengan datang langsung ataupun mengundang kelompok-kelompok nelayan untuk diberikan penyuluhan tentang aspek manajemen dalam mengelola kelompok nelayan tersebut.

Selanjutnya untuk pengembangan kapasitas interaksi antar kelompok nelayan masih belum optimal dilaksanakan oleh dinas, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh para nelayan masih dilakukan dengan cara seperti biasanya, selama ini tidak ada perubahan yang mendasar dalam kegiatan antar kelompok dalam hal berinteraksi.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Sulistiyani (2018:7) yang menyatakan bahwa: “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian

tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Berdasarkan teori di atas bahwa bina manusia dalam pemberdayaan merupakan proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

2. Bina Usaha

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi bina usaha diketahui bahwa pemberian penjelasan tentang peluang usaha nelayan pihak dinas telah menginformasikan komoditas ikan hasil tangkapan dengan penggunaan alat tangkap yang dianjurkan. Hal ini ditunjukkan dari anjuran penggunaan alat tangkap pancing rawai dengan ikan yang ditangkap seperti ikan kakap dan tongkol. Selanjutnya pemberian pengarahan tentang pengelolaan kelompok usaha, pihak dinas untuk memberikan pengarahan tentang pengelolaan kelompok masih jarang dilaksanakan, pengelolaan kelompok yang selama ini berjalan pada intinya merupakan hasil dari kesepakatan melalui musyawarah seluruh anggota kelompok nelayan.

Kemudian pemberian fasilitasi untuk mengembangkan usaha, nelayan dan kelompok nelayan belum dapat difasilitasi oleh pihak dinas dalam hal

bantuan modal usaha dan alat tangkap ikan, selama ini nelayan mendapatkan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatannya berasal dari KUD Mina Sari. Sementara dari kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan masih belum memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal usaha.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Aprillia, (2015:93) yang menyatakan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan”.

Berdasarkan teori di atas bahwa bina usaha dalam pemberdayaan pada dasarnya memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan merupakan sebuah tuntutan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam rangka pembangunan melalui penumbuhan inisiatif dan jiwa kewirausahaan.

3. Bina Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi bina lingkungan bahwa adanya penumbuhan sikap untuk memelihara dan pelestarian lingkungan, Dinas Kelautan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan nelayan mengajak seluruh masyarakat khususnya para nelayan untuk dapat menjaga kelestarian sumber daya alam yang dimiliki dari pencemaran dan pengrusakan.

Kemudian pemberian pemahaman terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Dinas Kelautan telah memberikan arahan dan penjelasan tentang berbagi anjuran dan larangan dalam melaksanakan kegiatan nelayan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya arahan untuk menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan aturan, larangan menggunakan bahan yang berbahaya dalam menangkap ikan dan mengajak untuk melaksanakan penanaman disekitar pantai dengan berbagai pohon.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Hikmat, (2010:14) bahwa:

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Berdasarkan teori di atas bahwa bina lingkungan dalam pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

4. Bina Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi bina kelembagaan bahwa pengkoordinasian orang-orang yang terlibat dalam kelompok usaha nelayan, Dinas Kelautan dalam melakukan identifikasi terhadap anggota kelompok nelayan masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini seperti adanya pelaksanaan tugas dalam kelompok nelayan kurang didukung dengan kemampuan yang dimiliki.

Kemudian penciptaan kerjasama dalam pengembangan kesepakatan, pengembangan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya antara Dinas Kelautan dan kelompok nelayan masih belum ada pengembangan atau

penjabaran bahkan pengaturan teknis untuk pelaksanaan dilapangan oleh para anggota kelompok.

Selanjutnya adanya pengarahan pada nelayan dalam melaksanakan aktivitas kelompok sesuai dengan tugas dan fungsinya bahwa pihak Dinas Kelautan telah mengajak seluruh anggota kelompok untuk dapat melaksanakan perannya masing-masing untuk mengembangkan kegiatan usaha kelompok.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat Mardikanto dan Soebianto (2019:28) bahwa: “Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya”.

Berdasarkan teori di atas bahwa suatu organisasi menjalankan pemberdayaan, di kalangan anggota organisasi akan tumbuh perasaan menjadi bagian dari kelompok. Tumbuh perasaan puas dalam mengambil tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan dilaksanakan dengan kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi bahwa Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung pada umumnya belum optimal sebagaimana pendapat Mardikanto dan Subiato, (2019 :113), yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan, seperti kurangnya pengembangan terhadap kapasitas kelompok nelayan, kurangnya pengembangan kapasitas interaksi antar kelompok nelayan, belum optimalnya pemberian pengarahan tentang pengelolaan kelompok nelayan, kurangnya adanya fasilitasi kelompok usaha dalam memperoleh modal usaha dan kurangnya penciptaan kerjasama dalam pengembangan kesepakatan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung antara lain belum adanya agenda yang ditetapkan, belum memadainya sarana dan fasilitas pendukung, rendahnya kemampuan sumber daya manusia anggota, keterbatasan sumber anggaran, belum adanya kesepakatan kerjasama yang terjalin, belum adanya pihak swasta

yang bersedia memberikan bantuan modal usaha, kurang dimilikinya sikap kebersamaan diantara anggota kelompok. Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, belum adanya agenda kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia, kurang terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta dan kurang adanya kebersamaan antar kelompok nelayan.

3. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam pemberdayaan nelayan Pantai Pananjung yaitu menyusun ulang agenda kegiatan, menyediakan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan kapasitas kelompok, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota melalui pemberian arahan dan penjelasan secara rutin, mengajak anggota kelompok untuk menjalin hubungan dan komunikasi dan mengajak untuk lebih mementingkan kepentingan kelompoknya, mengajukan permohonan penambahan anggaran pada pemerintah daerah, menjalin kerjasama dengan pihak perbankan untuk mempermudah nelayan dalam pengajuan pinjaman dan pihak swasta untuk bersedia memberikan bantuan modal usaha, mengajak anggota untuk saling kerja sama dan meminta untuk

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan. Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya yang dilakukan yaitu pengajuan penambahan anggaran, pengadaan sarana dan prasarana, penyusunan ulang agenda kegiatan, pengembangan sumber daya manusia, menjalin komunikasi dan pendekatan dengan berbagai pihak khususnya swasta dan mengajak seluruh anggota untuk menjalin kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia Krisnha. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung Alfabeta
- Hikmat, Harry. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebiato. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan

Profil Desa Pananjung. 2020

Soetomo, (2011). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subri, Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sulistiyani Ambar Teguh, (2018). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan